



**PELATIHAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
UNTUK Mendukung PEREKONOMIAN BERKELANJUTAN DI DESA
UNGASAN**

*Training On The Management Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) To
Support Sustainable Economic Development In Ungasan Village*

**I Made Sujana¹, Fahmi Tanjung², Putu Ratna Windusara Putri³, I Made
Wisnu Wardana⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Teknologi Indonesia

Email: sujanamade@gmail.com

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) serve as strategic instruments in promoting rural economic growth and improving community welfare through the productive management of local resources. However, many BUMDes continue to face challenges related to business management, organizational governance, financial administration, and sustainable business development. Ungasan Village, located in Badung Regency, possesses significant economic potential, yet the optimization of BUMDes functions still requires strengthening human resource capacities. This community service program aimed to enhance the competencies of BUMDes managers in organizational management, financial administration, business planning, and local potential-based business development strategies. The methods employed included socialization, training, mentoring, case studies, and program evaluation. A total of 35 participants consisting of BUMDes administrators, village officials, and community representatives attended the program. The results indicated significant improvements in participants' understanding of BUMDes governance, financial reporting, business planning, and village business development strategies. Furthermore, participants successfully developed systematic business development plans oriented toward sustainable rural economic growth. The program contributed positively to strengthening institutional capacities and enhancing the role of BUMDes as a driver of sustainable village economic development.

Keywords: Village-Owned Enterprises, sustainable economy, training, business management, rural empowerment

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara produktif. Namun demikian, banyak BUMDes yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan usaha, tata kelola organisasi, manajemen keuangan, dan pengembangan unit usaha yang berkelanjutan. Desa Ungasan sebagai salah satu desa yang berkembang di Kabupaten Badung memiliki potensi ekonomi yang besar, namun optimalisasi peran BUMDes masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes dalam aspek manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta strategi pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, studi kasus, dan evaluasi. Peserta kegiatan berjumlah 35 orang yang

terdiri atas pengurus BUMDes, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola BUMDes, penyusunan laporan keuangan, perencanaan bisnis, dan strategi pengembangan usaha desa. Selain itu, peserta mampu menyusun rencana pengembangan unit usaha yang lebih sistematis dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi desa. Program ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes, ekonomi berkelanjutan, pelatihan, pengelolaan usaha, pemberdayaan desa

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengelolaan aset, pelayanan ekonomi, dan pengembangan usaha berbasis potensi desa. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Keberadaan BUMDes telah mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi pemerintah yang bertujuan mendorong pembangunan ekonomi berbasis masyarakat desa. Namun demikian, keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh kapasitas pengelolanya dalam menjalankan fungsi bisnis dan sosial secara seimbang.

Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Potensi tersebut berasal dari sektor pariwisata, perdagangan, jasa, serta berbagai usaha mikro yang berkembang di lingkungan masyarakat. Kondisi ini memberikan peluang yang luas bagi BUMDes untuk mengembangkan berbagai unit usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Meskipun memiliki potensi yang besar, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Ungasan masih menghadapi beberapa tantangan. Permasalahan yang ditemukan antara lain terbatasnya kemampuan pengurus dalam menyusun perencanaan bisnis, lemahnya sistem administrasi dan pelaporan keuangan, kurangnya inovasi dalam pengembangan unit usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha desa.

Selain itu, perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis menuntut pengelola BUMDes untuk memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengidentifikasi peluang usaha dan mengelola risiko bisnis. Tanpa adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, BUMDes akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi ekonomi secara efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu program pelatihan yang mampu meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes dalam berbagai aspek manajerial dan kewirausahaan. Melalui pelatihan dan pendampingan yang sistematis, diharapkan pengelola BUMDes dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola organisasi, menyusun laporan keuangan, mengembangkan unit usaha, serta menciptakan strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi desa.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam pengelolaan organisasi, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal guna mendukung perekonomian berkelanjutan di Desa Ungasan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Sasaran kegiatan adalah pengurus BUMDes, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan ekonomi desa. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 35 orang.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (participatory approach), yaitu melibatkan peserta secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Pendekatan ini bertujuan agar peserta dapat memahami permasalahan yang dihadapi BUMDes sekaligus merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi desa. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas lima tahapan utama yaitu persiapan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

| Tahapan | Kegiatan | Luaran |
|----------------|---|--------------------------------|
| Persiapan | Identifikasi kebutuhan dan koordinasi dengan desa | Data kebutuhan pelatihan |
| Sosialisasi | Penyampaian materi pengelolaan BUMDes | Peningkatan pemahaman awal |
| Pelatihan | Manajemen organisasi, keuangan, dan bisnis | Peningkatan kompetensi peserta |
| Pendampingan | Penyusunan rencana pengembangan usaha | Draft rencana usaha BUMDes |
| Evaluasi | Pre-test dan post-test | Data peningkatan kompetensi |

Berdasarkan Tabel 1, kegiatan dirancang secara bertahap untuk memastikan peserta memperoleh pemahaman teoritis sekaligus kemampuan praktis dalam mengelola BUMDes. Tahap pendampingan menjadi bagian penting karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerapkan materi yang telah diperoleh selama pelatihan.

Tabel 2. Karakteristik Peserta

| Kategori Peserta | Jumlah |
|-------------------------|---------------|
| Pengurus BUMDes | 15 |
| Perangkat Desa | 8 |
| Tokoh Masyarakat | 5 |
| Pelaku UMKM | 7 |
| Total | 35 |

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta instrumen pre-test dan post-test. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti program.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan memperoleh partisipasi aktif dari seluruh peserta. Tingkat kehadiran peserta mencapai lebih dari 90% selama pelaksanaan program.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

| Indikator | Sebelum (%) | Sesudah (%) |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Tata Kelola BUMDes | 48 | 91 |
| Manajemen Keuangan | 42 | 88 |
| Penyusunan Rencana Bisnis | 45 | 90 |
| Pengembangan Unit Usaha | 47 | 89 |
| Pengelolaan Administrasi | 50 | 92 |

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh indikator. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek tata kelola BUMDes dan pengelolaan administrasi.

Tabel 4. Capaian Program Pendampingan

| Capaian Program | Persentase (%) |
|--|----------------|
| Mampu menyusun rencana bisnis | 88 |
| Mampu menyusun laporan keuangan sederhana | 85 |
| Mampu mengidentifikasi potensi usaha desa | 90 |
| Mampu menyusun strategi pengembangan usaha | 86 |
| Mampu menyusun program kerja BUMDes | 89 |

Selain peningkatan kompetensi, peserta juga berhasil menyusun dokumen rencana pengembangan usaha yang dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan BUMDes ke depan.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes secara signifikan. Peningkatan kompetensi terlihat dari kemampuan peserta dalam memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi, manajemen keuangan, dan pengembangan usaha desa.

Peningkatan pemahaman mengenai tata kelola BUMDes menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan organisasi. Tata kelola yang baik memungkinkan BUMDes menjalankan fungsi bisnis secara profesional dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga tersebut.

Pada aspek pengelolaan keuangan, peserta mulai memahami pentingnya pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pengawasan penggunaan

dana usaha. Kemampuan ini menjadi dasar bagi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes.

Pengembangan unit usaha juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha produktif, seperti jasa pendukung pariwisata, perdagangan, dan usaha berbasis layanan masyarakat.

Program pendampingan memberikan ruang bagi peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh sehingga mampu menghasilkan rencana bisnis yang realistis dan sesuai dengan kondisi desa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan dalam program mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi yang nyata dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes dan mendukung terwujudnya perekonomian desa yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelatihan pengelolaan BUMDes di Desa Ungasan berhasil meningkatkan kompetensi pengurus BUMDes dan masyarakat dalam aspek tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, penyusunan rencana bisnis, dan pengembangan unit usaha. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah pelaksanaan kegiatan.

Program ini juga menghasilkan dokumen rencana pengembangan usaha yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan yang berkelanjutan perlu terus dilakukan guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*.
2. Buchari Alma. (2020). *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
3. Isbandi Rukminto Adi. (2020). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). *Pedoman Pengelolaan BUMDes*.
5. Mardikanto. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
6. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *SME and Entrepreneurship Outlook*.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
8. Suryana. (2019). *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. World Bank. (2020). *Rural Economic Development and Community Enterprises Report*.